

# SISTEM PEMERINTAHAN PAKU ALAM V DI MASA PENJAJAHAN

## HINDIA BELANDA PADA TAHUN 1878 – 1900

Mahadi Hidayat

Program Studi Pendidikan Sejarah

Universitas PGRI Yogyakarta

E-mail: [mahadihidayat64@gmail.com](mailto:mahadihidayat64@gmail.com)

DOI: 10.31316/karmawibangga.v5i2.1837

---

### Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh Paku Alam V dalam menjalankan roda kehidupannya dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Paku Alam V khususnya di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis atau sejarah. Pemilihan metode ini karena objek yang dikaji adalah peristiwa masa lalu. Langkah-langkah dalam metode historis ini dimulai dari mengumpulkan sumber, kritik sumber, Interpretasi, kemudian historiografi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu mengenai bangkitnya sistem Pemerintahan Pakualaman pada masa kepemimpinan Paku Alam V dari krisis ekonomi dengan cara melakukan penghematan dalam skala besar di lingkup internal kadipaten maupun dalam sistem ekonomi masyarakat.

**Kata kunci:** Kadipaten, Paku Alam V, Pemerintahan

### PENDAHULUAN

Menurut buku yang diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjudul “Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta”. Pada buku tersebut tertulis bahwa, Kadipaten Pakualaman merupakan *praja kejawen* terakhir yang menandai perjalanan sejarah panjang kerajaan di Jawa. Berdiri pada tanggal 17 Maret 1813 dengan ditandatanganinya kontrak politik antara Paku Alam I dengan Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles. Secara *de facto* Pangeran Notokusumo telah diangkat sebagai *Pangeran Merdika* yang bergelar Paku Alam pada tanggal 29 Juni 1812 tetapi belum disertai adanya politik kontrak dengan Gubernur Inggris.

Berdirinya Kadipaten Pakualaman melengkapi pecahnya dinasti Mataram Islam menjadi empat kerajaan. Peristiwa semacam ini bukan pertama kali terjadi dalam sejarah kerajaan di Jawa. Selain *palihan nagari* yang menyebabkan Mataram terbagi dua, Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, kemudian pecahnya Kasunanan Surakarta

dengan berdirinya Kadipaten Mangkunegaran (Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017: 97).

Banyak teori yang menyatakan bahwa berdirinya Kadipaten Pakualaman adalah upaya untuk memperlemah posisi pemerintahan yang sudah ada di tanah Jawa. Selain itu juga sebagai upaya untuk mengadu-domba antar kerajaan untuk selanjutnya dikuasai oleh pemerintah kolonial. Dalam hal ini pemerintah kolonial menjaga keberadaan Kasultanan Yogyakarta dengan tidak membiarkan Kasultanan Yogyakarta menjadi kerajaan yang kuat sehingga memungkinkan adanya perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Sebaliknya keberadaan kerajaan-kerajaan ini dijadikan sebagai partner pemerintah kolonial dalam menjalankan pemerintahan yang tidak langsung (*indirect rule*) selain mengatur pengangkatan lurah juga mengatur tentang pengangkatan *carik* maupun *ulu-ulu*, penghasilan, kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan, seragam, kedudukan dan hal lain yang berkaitan dengan lurah maupun pejabat desa lainnya (Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017: 97 & 107).

Sepeninggal Paku Alam I dan II, sistem pemerintahan di Kadipaten Pakualaman tidak banyak mengalami perubahan. Pangeran Suryaningrat yang bertahta sebagai Adipati Paku Alam III lebih konsentrasi mengembangkan kesusasteraan. Akan tetapi bidang kesusasteraan pun tidak mengalami perkembangan berarti sepeninggal Paku Alam III. Ketika naik tahta sebagai

penguasa Kadipaten Pakualaman pada tanggal 1 Desember 1864 Pangeran Nataningrat masih berusia 24 tahun dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati (KGPA) Surya Sasraningrat dan menjadi Paku Alam IV. Tanggal 24 September 1878 Paku Alam IV meninggal dunia (Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017: 110).

Masa pemerintahan PAA Suryodilogo sebenarnya memiliki beban cukup berat karena harus melunasi hutang sebesar f 100.000,- yang harus segera dilunasi. Terkait dengan pelunasan ini Pemerintah Hindia Belanda akan memberikan hadiah pangkat kolonel serta penganugerahan gelar Paku Alam V apabila berhasil melunasi. Dalam waktu empat tahun Pangeran Adipati Aria Suryodilogo berhasil melunasi kewajibannya untuk membayar hutang f 100.000,-. Oleh karena itu pada tanggal 20 Maret 1883 PAA Suryodilogo resmi dinobatkan sebagai penyandang gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aria (KGPA) Paku Alam V dengan pangkat militer sebagai seorang kolonel. Pada masa Paku Alam V inilah gelar raja yang bertahta diubah menjadi Kanjeng Gusti Adipati Aria (KGPA) Paku Alam V yang kemudian melekat pada Adipati yang bertahta selanjutnya (Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017: 112).

Masa kepemimpinan Paku Alam V banyak mengalami kesulitan dan masalah terutama di bidang perekonomian yang diwarisi oleh Paku Alam IV. Kesulitan yang dihadapi oleh Paku Alam V untuk

lingkungan Pura Pakualaman sendiri melakukan kebijakan agar pengeluaran dan pemasukan dibatasi dan tidak dipergunakan untuk hal yang tidak perlu. Untuk itu, maka Paku Alam V mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan untuk menyelamatkan pemerintahannya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis atau sejarah. Pemilihan metode ini karena objek yang dikaji adalah peristiwa masa lalu. Kuntowijoyo (2003: 19) mengartikan metode sebagai ilmu yang membicarakan jalan, sehingga metode sejarah merupakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang bahan, kritik, interpretasi, dan penyajian sejarah. Moh. Nazir (1988: 55) mengemukakan bahwa metode sejarah adalah suatu penyelidikan dengan kritis terhadap keadaan-keadaan perkembangan serta pengalaman di masa lalu dengan menimbang secara teliti dan hati-hati tentang bukti dan validasi dari sumber sejarah dan interpretasi dari sumber-sumber tersebut.

Metode sejarah terdiri atas empat kelompok kegiatan atau empat langkah penelitian, yaitu: (1) heuristik (pengumpulan data), (2) kritik (penilaian data), (3) interpretasi (penafsiran data), dan (4) historiografi (penyimpulan dan penulisan) (W. Surakhmad, 1982: 133).

Langkah-langkah dalam metode sejarah dapat dideskripsikan sebagai berikut.

## **1. Mengumpulkan Sumber**

Heuristik, yaitu mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang terkait dengan topik penelitian. Adapun sumber-sumber tersebut ditemukan dan dikumpulkan dari perpustakaan Kulon Progo, perustakaan Kota Yogyakarta, perpustakaan Pura Pakualaman, dan jurnal daring.

Adapun sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu buku, artikel, jurnal dan skripsi yang terkait dengan tema penelitian yang ditulis oleh penulis sebelumnya. Data sejarah yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang ditulis (Kuntowijoyo, 2013: 73).

## **2. Kritik Sumber**

Kritik adalah suatu kegiatan menyelidiki keautentikan dari keaslian data dalam hal ini data yang telah diperoleh diklarifikasikan mana yang autentik dan mana yang tidak autentik yang tidak dapat digunakan untuk mendukung penelitian. Data yang tidak autentik tidak dipakai dan data yang dipakai adalah data yang autentik yang dapat mendukung penelitian. Selanjutnya data yang terkumpul dikritik dengan menggunakan dua cara, (1) kritik intern, digunakan untuk menguji kesahihan (kredibilitas) sumber. (2) kritik ekstern, digunakan untuk menguji keaslian (otentisitas) sumber (Dudung A, 1999: 58-59).

Verifikasi itu ada dua macam: *autentisitas*, atau keaslian sumber atau kritik ekstern, dan kredibilitas, atau

kebiasaan dipercayai atau kritik intern (Kuntowijoyo, 2013: 77).

### 3. Interpretasi

Setelah data terkumpul dan sudah dianalisis lewat kegiatan kritik sumber, langkah selanjutnya adalah menafsirkan makna yang saling berhubungan dari data yang diperoleh. Kegiatan ini dilakukan oleh penulis dengan cara membandingkan antara sumber satu dengan sumber yang lainnya, karena data yang dikumpulkan dari berbagai buku yang ditulis oleh berbagai pengarang, untuk mengurangi subjektivitas pengarang maka diutamakan ketajaman dalam menginterpretasikan data sejarah.

Interpretasi sejarah disebut juga dengan analisis. Dalam hal ini pada langkah interpretasi ada dua metode yang digunakan, yaitu analisis dan sintesis. Keduanya dipandang sebagai metode utama di dalam interpretasi (Kuntowijoyo, 1995: 100).

### 4. Historiografi

Historiografi adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan sintesis yang diperoleh dalam bentuk suatu cerita. Langkah terakhir ini merupakan langkah menulis sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan, dianalisa, dan ditafsirkan sehingga tersusun hasil penelitian skripsi tentang Sistem Pemerintahan Paku Alam V di Masa Penjajahan Hindia Belanda pada Tahun 1878-1900.

Dan penyajian dalam bentuk tulisan mempunyai tiga bagian: (1)

Pengantar, (2) Hasil Penelitian, dan (3) Simpulan (Kuntowijoyo, 2013: 80-81).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, sering terjadi pencampuran dalam menggunakan istilah “bentuk pemerintahan” dan “sistem pemerintahan”. Padahal dalam ilmu negara, kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan mendasar. Menurut Hans Kelsen, dalam teori politik klasik, bentuk pemerintahan diklasifikasikan menjadi monarki dan republik (Kelsen, 1971: 256). Ditambahkan Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, paham L. Duguit dalam buku “*Traite’ de Droit Constitutionel*” (1923) lebih lazim dipakai untuk membedakan kedua bentuk tersebut (Ibrahim, 1988: 166). Jika kepala negara diangkat berdasarkan hak waris atau keturunan maka disebut dengan monarki. Sedangkan jika kepala negara dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan yang tertentu maka bentuk negaranya disebut republik (*ibid*) (Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016: 8).

Sri Paku Alam V dilahirkan pada hari Minggu Wage 5 Sapat 1761 atau 23 Juni 1833. Beliau dinobatkan sebagai Kepala Kadipaten Pakualaman dengan gelar dan nama KGPAA Prabu Suryodilogo dan berpangkat militer Letnan Kolonel pada hari Kamis Wage 13 Sawal 1807 atau 10 Oktober 1878 (Soedarisman Poerwokoesoemo, 1985: 247).

Secara etimologi kata Hindia berasal dari bahasa latin, *Indus*. Nama asli *Dutch Indies* diterjemahkan oleh orang Inggris sebagai “Hindia Timur Belanda” tercatat dalam dokumen *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) pada awal tahun 1620-an. Selama abad ke-19, daerah jajahan dan hegemoni Belanda diperluas, mencapai batas wilayah teritorial terbesar mereka pada awal abad ke-20. Hindia Belanda adalah salah satu koloni Eropa yang paling berharga dibawah kekuasaan Imperium Belanda, dan berkontribusi pada keunggulan global Belanda dalam perdagangan rempah-rempah dan hasil bumi (Nur Laely, 2018: 3).

Pendirian Pakualaman sebenarnya merupakan situasi disintegrasi lebih lanjut bagi kerajaan Mataram. Dalam tahun 1755 lewat Perjanjian Giyanti, Mataram telah terbagi menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Lebih disintegratif lagi karena wilayah kedua kerajaan itu terpecah secara tidak beraturan. Ada wilayah Surakarta yang terletak di Barat Yogyakarta, ada wilayah Yogyakarta yang terletak di Timur Surakarta. Dengan demikian sulit bagi kedua kerajaan itu untuk membangun kekuatan yang utuh. Tetapi itulah memang yang dikehendaki VOC, supaya VOC menjadi yang terkuat.

Lain halnya dengan Pakualaman. Kadipaten itu hanya berwilayah satu kecamatan dalam Kota Yogyakarta dan empat kecamatan di wilayah Kulon Progo, yaitu daerah yang bernama Kadipaten Adikarto. Kecilnya daerah Pakualaman,

dipandang dari proses integrasi bangsa, menguntungkan, seperti akan terlihat nanti. Pembentukan Kadipaten Pakualaman memang merupakan disintegrasi dari Kerajaan Mataram, yang dalam abad ke-17 pernah berjaya. Dipandang dari proses integrasi bangsa pun, lahirnya Pakualaman merupakan proses disintegrasi. Lahirnya Kadipaten Pakualaman dengan status penguasanya sebagai *Pangeran Merdika* ditentukan oleh pihak penjajah, semula Inggris dan kemudian Belanda (G. Moedjanto, 1994: 30).

Sri Paku Alam IV mangkat pada tanggal 24 September 1878. Beliau hanya meninggalkan dua putera laki-laki yang belum dewasa, dan yang dilahirkan oleh garwa klangenan atau selir. Berhubungan dengan itu beliau digantikan oleh putera bungsu laki-laki Sri Paku Alam II yang bernama KPH Suryodilogo. Seperti halnya dengan Kepala Kadipaten Mangkunegaran, sebelum berusia 40 tahun, belum mempergunakan nama dan gelar KGPAA Mangkunegoro, melainkan KGPAA Prang Wedono (Soejono dalam Djoko Dwiyanto 2009 : 41).

Di samping itu perlu dicatat pula, bahwa baik Sri Paku Alam III maupun Sri Paku Alam IV, tatkala belum mencapai usia 5 windu, keduanya mempergunakan nama dan gelar KGPA Suryo Sasraningrat. Jadi belum atau tidak memakai nama dan gelar KGPA Suryo Sasraningrat. Jadi belum atau memakai nama Suryodilogo. Nama Suryodilogo yang dipergunakan oleh Kepala Kadipaten Pakualaman sebelum mencapai usia 5 windu, baru

mulai dipergunakan oleh Sri Paku Alam V (Soedarisman Poerwokoesoemo, 1985: 70).

Sri Paku Alam V memang memikul tanggung jawab yang tidak ringan. Akan tetapi berkat keteguhan hatinya, beliau dapat melaksanakan segala sesuatu yang telah lama direncanakannya ialah:

1. Mengadakan penghematan dalam pengeluaran Kadipaten Pakualaman.
2. Mencegah segala pengeluaran yang tidak perlu.
3. Memberikan pendidikan kepada putera-putera dari keluarga Dalem dengan tidak menghiraukan celaan-celaan yang tidak pada tempatnya (Djoko Dwiyanto, 2009: 44).

Secara umum, pemerintahan di Kadipaten Pakualaman dari masa ke masa dapat digambarkan sebagai berikut. Kadipaten Pakualaman merupakan sebuah negara dependen atau otonom berbentuk monarki yang terkecil dari beberapa monarki yang ada di Jawa, seperti Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Monarki Kadipaten Pakualaman dibentuk dengan sistem monarki Kepangeranan atau lazim disebut *Pangeran Merdika*. Pemerintahan di Kadipaten Pakualaman dijalankan oleh Sri Paku Alam bersama-sama dengan Residen Belanda (<http://www.kerajaanusantara.com/id/kadipaten-pakualaman/pemerintahan> Diakses pada 8 Agustus 2021).

Dalam bukunya “De verhouding der Vorsten” tentang Sri Paku Alam V itu

Filet pada halaman 123 dan seterusnya kurang lebih menulis sebagai berikut:

Pada tanggal 24 September 1878 Sri Paku Alam IV mangkat dengan tidak meninggalkan keturunan yang mempunyai hak untuk menggantikannya. Pamannya KPH Suryodilogo, putera Sri Paku Alam II dari garwo klangenan, Komandan Infantri Legiun Pakualaman yang berpangkat Mayor, diangkat menjadi penggantinya sebagai Kepala Kadipaten Pakualaman dengan gelar dan nama KGPAA Prabu Suryodilogo. Pengangkatan beliau itu terjadi pada tanggal 9 Oktober 1878. Beberapa hari sebelum itu, ialah pada tanggal 4 Oktober 1878, atas kehendak gubernemen Belanda, KPH Suryodilogo mengadakan janji, seperti setahun yang lampau juga telah dilakukan oleh Sri Sultan, bahwa gubernemen Belanda diperkenankan untuk mengeluarkan aturan-aturan dan mengadakan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu di Keresidenan Yogyakarta.

Pada tahun 1892 Sri Paku Alam V dibebaskan dari kewajiban untuk memelihara sebuah Legiun untuk kepentingan gubernemen Belanda. Hubungan antara gubernemen Belanda dengan para Sri Paku Alam senantiasa baik. Sekali waktu memang pernah ada alasan untuk tidak merasa puas jika kehendak gubernemen Belanda tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Akan tetapi suatu gangguan dalam hubungan antara gubernemen Belanda dan Kadipaten Pakualaman tidak pernah terjadi. Pengaruh dari pemerintah Belanda, sekalipun secara tidak terasa akan tetapi

dengan pasti semakin menjadi bertambah besar, dan kekuasaan Kadipaten Pakualaman dikurangi dalam batas-batas tertentu. Kadipaten Pakualaman bukan merupakan hak yang turun temurun bagi keluarga Sri Paku Alam. Hal ini dapat dibaca dengan jelas dari pasal-pasal Politik Kontrak tanggal 17 Maret 1813. Hanya jika seorang keluarga Pakualaman diangkat sebagai Kepala Kadipaten Pakualaman, maka beliau mempunyai hak untuk memiliki Kadipaten itu. Gelar dan namanya adalah “KGPA Paku Alam” dan kepada beliau diberikan pangkat militer “Kolonel”. Gelar dan nama itu baru diberikan oleh gubernemen Belanda, setelah seorang Kepala Kadipaten Pakualaman mencapai usia genap 40 tahun, atau sebelumnya menurut kehendak gubernemen Belanda. Sebelum itu Kepala Kadipaten Pakualaman mempergunakan nama dan gelar “KGPA Suryo Sasraningrat” dan diberi pangkat militer “Letnan Kolonel”. Jika Sri Paku Alam V sebelumnya tidak mempergunakan nama “KGPA Suryo Sasraningrat”, melainkan “KGPA Prabu Suryodilogo”, maka hal ini hanyalah menruoakan suatu pengecualian. Sebab hal ini baru terjadi kali ini saja, sedangkan sebelumnya yang dipergunakan adalah senantiasa “Suryo Sasraningrat”.

Sampai tahun 1892 para Kepala Kadipaten Pakualaman diwajibkan memelihara Legiun Pakualaman, yang mendapat ganti rugi dari gubernemen Belanda, yang dilatih oleh opsir-opsir Belanda, dan menerima seragam serta persenjataan dari gubernemen Belanda. Syarat-syarat tentang kewajiban untuk

memelihara Legiun Pakualamn itu diatur oleh Politik Kontrak tanggal 17 Maret 1813 pasal-pasal 5, 6, 7 dan 8. Kemudian aturan-aturan itu diganti oleh Politik Kontrak tanggal 28 Januari 1832 dan Politik Kontrak 1 Juni 1833.

Dalam Politik Kontrak 12 Agustus 1870 Sri Paku Alam IV diberi wewenang untuk memperluas Legiun Pakualaman dengan satu batalyon infantri dan satu kompi kavaleri, sedangkan ganti rugi dari gubernemen Belanda untuk itu ditambah. Sejak itu Sri Paku Alam harus tunduk kepada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh gubernemen Belanda mengenai gaji, seragam, persentajaan, dan sebagainya seperti yang diatur dalam Bijblad 3097, 3098 dan 4182. Akan tetapi pada bulan Agustus 1892 Sri Paku Alam V dibebaskan dari kewajiban untuk memelihara Legiun Pakualaman, dan subsidi dari gubernemen Belanda untuk itu pun dicabut. Opsir-opsir bekas Legiun Pakualaman sepanjang hidupnya masih tetap menerima gaji, sedangkan para serdadu menerima pesangon dua bulan. Akan tetapi keluarga Pakualaman masih tetap mempunyai hak untuk mempergunakan pangkat militernya secara kehormatan (G. Moedjanto, 1994: 30).

Bagi Sang Adipati keputusan pembubaran Legiun juga tidak menyenangkan. Namun, dia tidak mau larut dalam kesedihan dan mengungkapkan kekecewaannya secara terbuka. Yang dilakukannya justru sebaliknya yaitu meningkatkan kinerja polisi dan pengadilan. Praktik-praktik

penyeludupan dan penyelewengan diatasi dengan ketegasan berlandaskan hukum. Paku Alam V terus-menerus dijiwai oleh semangat untuk memajukan kadipatennya dibantu oleh putra sulungnya, PA Ario Notokusumo (*Vereeniging Habi Darmo Wargo dalam Sudibyo 2015 : 124*).

Menurut para saksi mata yang hidup sezaman dengannya, Paku Alam V dikenal memiliki kepribadian yang menyenangkan dengan tatakrama yang santun serta memiliki banyak sahabat. Seorang yang memiliki pemikiran maju, ramah, dan energik. Di hadapan sejumlah keluarga besarnya, dia dapat menunjukkan kehalusan budinya. Di tengah-tengah rakyatnya dia berpenampilan elegan serta sangat menyadari posisinya sebagai raja (*Vereeniging Habi Darmo Wargo dalam Sudibyo 2015 : 124*). Sementara itu, di kalangan peneliti kebudayaan Jawa berkebangsaan Belanda ia dikenang sebagai tuan rumah yang sangat baik (Stibbe, Wintgens en Uhlenbeck dalam Sudibyo 2015 : 124).

Berbeda dengan kebanyakan kerabat kerajaan lain, Paku Alam V tidak berwatak konservatif. Dia menunjukkan sikap dan pemikiran modern, sangat terpelajar, serta berpikir jauh lebih maju daripada orang-orang sezamannya. Dalam keadaan kesulitan finansial, ia tetap mendorong anggota keluarga besarnya untuk dapat bersekolah di sekolah-sekolah Eropa. Bahkan, ia memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke Belanda. Dengan demikian, meskipun Kadipaten Pakualaman merupakan swapraja yang

termuda dari empat swapraja penerus Kerajaan Mataram, kadipaten ini merupakan yang pertama memanfaatkan kesempatan itu (*Vereeniging Habi Darmo Wargo; Scherer; Poeze dalam Sudibyo 2015 : 125*).

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada masa pemerintahan Paku Alam V dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya sebagai berikut.

### **1. Politik**

Kedekatan Paku Alam V dengan Tarikat Mason Bebas terjalin sejak Paku Alam V masih menyandang nama P.A. Suryodilogo. Pada 1871, ia dikukuhkan sebagai anggota kehormatan tarikat itu di Loji (*lodge*) Mataram, Yogyakarta. Bergabungnya Paku Alam V dengan Tarikat Mason Bebas merupakan prestasi sekaligus prestise bagi tarikat tersebut. Ia merupakan anggota keluarga kerajaan Jawa pertama yang menyatakan diri bergabung dengan tarikat tersebut. Keanggotaan Paku Alam V diharapkan menjadi magnet bagi keluarga bangsawan Jawa yang lain untuk menjadi anggota. Anak-anak Paku Alam V kemudian juga tercatat sebagai anggota Tarikat Mason Bebas, seperti P.A. Notokusumo (Paku Alam VI), P.A. Notodirojo, P.A. Kusumoyudo, dan bahkan cucunya Paku Alam VII (Stevens dalam Sudibyo 2015 : 127).

Alasan tentang kesediaan para penguasa Kadipaten Pakualaman bergabung dengan Tarikat Mason Bebas tidak pernah terungkap dengan jelas. Akan tetapi, kemungkinan besar mereka tertarik

kepada anggaran dasar tarikat yang menepatkan kesetaraan dan pluralisme sebagai tujuan yang penting. Dalam pasal 2 ayat 4 disebutkan bahwa tarikat mengakui: (1) nilai kepribadian manusia; (2) hak setiap orang untuk mencari kebenaran secara mandiri; (3) persamaan dalam wujud semua manusia (Stevens dalam Sudibyo 2015 : 128).

Tampaknya anggaran dasar yang menempatkan manusia dan kemanusiaan sebagai isu sentral serta kebebasan menjalankan laku spiritual yang memiliki kesamaan dengan inti ajaran kejawaan itulah yang mendekatkan mereka dengan Tarikat Mason Bebas. Hal itu juga dirasakan oleh Raden Mas Adipati Aryo (R.M.A.A) Poerbohadiningrat, mantan bupati Semarang dan Salatiga (Hadiningrat; Veur dalam Sudibyo 2015 : 128).

Dalam pemerintahan sehari-hari Paku Alam V di ibukota kerajaan dibantu oleh seorang patih yang membawahi seorang *kliwon patih* dan mantra jurutulis serta beberapa orang jurutulis. Untuk pemeliharaan keamanan patih dibantu oleh polisi kota meliputi polisi *panekar* berjumlah empat di Gunungketur, Jagalan, Purwanggan, dan Kepatihan. Para polisi ini dibantu oleh kebayan kampung terdiri atas tokoh-tokoh yang disegani di kalangan masyarakat setempat. Sementara itu, di luar ibukota, adalah hal ini di wilayah Adikarto (sekarang masuk wilayah Kabupaten Kulonprogo) pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh seorang *rio bupati* yang dibantu oleh dua orang *panewu* pangreh praja (di Pandowan

dan Sogan) dan empat orang mantra polisi yang kedudukannya setara asisten wedana di Bendungan, Wates, Sindutan, dan Karangwuni (Ringkesaning Wawaton, t.t.: 8 dalam Sudibyo 2015 : 128).

Untuk persoalan hukum, Pengadilan *Darah Dalem (Raad Kasentanan)* dan pengadilan umum bertugas menangani dan memutus perkara. Kewenangan itu dijalankan oleh Jaksa Agung Hukum Pakualaman (Jaksa Ageng Pradata Pakualaman) dibantu oleh dua orang wakil jaksa, beberapa orang juru tulis dan enam orang *jogolatri* atau *jogowesti* yang memiliki kedudukan seperti polisi. Para *jogolatri* atau *jogowesti* ini memiliki kewenangan memejarakan orang-orang yang telah diputus bersalah. Dengan demikian, dari segi kewenangan, pengadilan ini tidak berbeda dengan pengadilan *Landraad* atau dewan negeri pada waktu itu (Ringkesaning Wawaton, t.t.: 8 dalam Sudibyo 2015 : 128).

Paku Alam V merupakan penguasa Kadipaten Pakualaman yang pertama melakukan pembagian kekuasaan secara terstruktur. Sebagai pemimpin karismatis - - meminjam istilah Max Weber-- yang sudah sejak lahir memiliki kualitas individual yang mendudukkannya berbeda dengan orang kebanyakan dan dianggap dikaruniai kekuatan supranatural serta adimanusiawi untuk memimpin sebuah dinasti (Pugh dan Hickson; Winkler dalam Sudibyo 2015 : 128), kesediaan Paku Alam V untuk berbagi kekuasaan merupakan tindakan yang terpuji.

## 2. Ekonomi

Meskipun dari sisi birokrasi Kadipaten Pakualaman mengalami kemajuan, dari sisi lain, yaitu dari segi finansial, kadipaten belum memiliki pengaturan yang baik. Sumber-sumber pendapatan yang seharusnya dapat diperoleh dari pajak belum dioptimalkan, misalnya pajak penghasilan (*inkomsten belasting*), pajak upah (*loon belasting*), pajak bumi dan bangunan (*verponning belasting*), dan pajak tontonan (*vermakkelijkheid belasting*). Yang sudah diberlakukan adalah pajak tanah milik kadipaten dan pajak pekerjaan yang tidak dapat diandalkan sebagai penghasilan kadipaten (Ringkesaning Wawaton, t.t.: 9 dalam Sudibyo 2015 : 129).

Gambaran krisis finansial yang sedang dialami pada masa pemerintahan Paku Alam V tergambar jelas pada surat yang ditulis oleh K.P.H. Notodirojo (anak Paku Alam V) melalui surat yang ditunjukkan kepada anak-anaknya yang sedang menempuh pendidikan di negeri Belanda. Surat itu kurang lebih berbunyi sebagai berikut: “Oh anak-anakku, kalian pasti tak bisa membayangkan seperti apa keadaannya ketika aku mulai bertugas di Kadipaten. Bahkan sebagian besar kebutuhan pokok kami tak punya. Bayangkan, ketika eyang kalian ingin mengadakan resepsi atau pesta, kami selalu harus meminjam kursi, lampu, gelas, dan sebagainya, dari sana-sini agar dapat menjamu tamu...” (Sudibyo dalam Baha Uddin 2010 : 19).

Reformasi pengelolaan keuangan Kadipaten Pakualaman terutama di wilayah Adikarto dimulai ketika Paku

Alam V menunjuk K.P.H. Notodirojo, putra ke-5 sang adipati untuk mengurus soal-soal keuangan. Bagi Notodirojo meskipun suatu kehormatan tugas itu merupakan tugas yang tidak ringan karena menuntut tanggung jawab yang sangat berat. Pada waktu itu, keadaan kas Kadipaten Pakualaman dalam keadaan yang sangat tidak menggembirakan karena defisit warisan penguasa sebelumnya (Dewantara dalam Sudibyo 2015 : 129).

Situasi itu, melalui surat, disampaikan oleh K.P.H. Notodirojo kepada anak-anaknya yang sedang menempuh pendidikan di negeri Belanda. Kadipaten tidak memiliki lagi perkakas penting untuk menjamu tamu. Dalam waktu singkat K.P.H. Notodirojo mempelajari sebab-sebab krisis keuangan yang melanda Kadipaten Pakualaman yang ternyata diakibatkan oleh ketidakseimbangan neraca keuangan karena jumlah pengeluaran jauh melebihi pemasukan. Kondisi ini menyebabkan kadipaten terjerat utang-utang dalam jumlah besar (f.1000.000) dengan bunga tinggi (15%-30%). Untuk itu, sebagai administrator lulusan HBS Jakarta dan Semarang, secara berkala K.P.H. Notodirojo merasa perlu untuk mendatangi dan memeriksa sendiri pekerjaan-pekerjaan bawahannya untuk mengetahui apakah uang yang dikeluarkan benar-benar digunakan secara bertanggung jawab. Kebijakan pangeran muda yang sangat tegas dan tanpa kompromi ini mendatangkan ketidaksukaan di kalangan pegawai istana dan bawahannya. Akan tetapi, dia

bergeming sampai berhasil mencapai tujuannya, yaitu keseimbangan neraca keuangan kadipaten. Di samping itu, juga dilakukan penghematan besar-besaran sehingga pada 1889 semua utang kecuali utang kepada Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda telah terbayar (Dewantara; Djajaningrat-Nieuwenhuis dalam Sudibyo 2015 : 130).

Melihat keberhasilan K.P.H. Notodirojo menata keuangan kadipaten, Paku Alam V kembali menugasinya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keagrariaan di daerah Adikarto yang pada waktu itu belum tertata dengan baik. Dia segera menerbitkan peraturan sewa-menyewa dan perpajakan. Oleh pangeran ini diputuskan bahwa penyewaan tidak dilakukan melalui perantara kepala-kepala distrik, tetapi langsung kepada warga yang membutuhkannya. Karena itu, perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat dan merugikan rakyat banyak, sesudah habis masa berlakunya tidak dilanjutkan lagi.

Tanah-tanah yang diperoleh kembali oleh kadipaten dengan kebijakan itu kemudian diberikan kepada rakyat yang memerlukannya dengan sistem bagi hasil. Hal ini mendatangkan kesulitan bagi sang pangeran karena dia harus menyelaraskan kepentingan pabrik gula yang telah memiliki konsesi atas tanah-tanah itu dan kepentingan rakyat. Akan tetapi, karena tugas itu dilakukan dengan niat luhur untuk memperbaiki keadaan, tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik (Sudibyo, 2015 : 129).

### 3. Sosial

Pada masa pemerintahannya, intensitas perselisihan administratif yang direkam dalam arsip peradilan meningkat karena perubahan sistem perpajakan yang mempengaruhi relasi sosial pegawai Eropa dan pejabat desa di wilayah Adikarto (Margana dalam Iskarohma binti Nurhamidyah<sup>(1\*)</sup>, Yofa Pradhani Nabillah<sup>(2)</sup>, Lillyana Mulya<sup>(3)</sup> 2019 : 112). Meskipun relasi sosial dalam area perkebunan tidak lebih baik daripada perkebunan di wilayah lain di Yogyakarta, pemerintahan Paku Alam V masih menempatkan norma *adat* sebagai penyeimbang dalam perselisihan antara warganya dengan orang Eropa. Pada tahun 1900, kekuasaan Paku Alam V berakhir dan digantikan oleh Paku Alam VI, seorang putra dari Paku Alam V (Poerwokoesoemo dalam Iskarohma binti Nurhamidyah<sup>(1\*)</sup>, Yofa Pradhani Nabillah<sup>(2)</sup>, Lillyana Mulya<sup>(3)</sup> 2019 : 112).

Untuk membantu masyarakat bersekolah, Paku Alam V pada tahun 1885 mengeluarkan kebijakan tentang pemberian izin bagi putra-putri bangsawan di Yogyakarta untuk bersekolah di sekolah-sekolah Belanda. Selain berupa keluarnya kebijakan tersebut, Paku Alam V kemudian juga mendirikan *Darmawara*, sebuah perkumpulan untuk membantu warga yang tidak mampu agar dapat bersekolah di sekolah Belanda. *Darmawara* kemudian dikelola oleh Notodirojo, ketika ia telah tamat dari HBS dan menjadi penanggung jawab keuangan istana (Mutiah Amini dalam Sudibyo 2018: 85).

#### 4. Budaya

Di Perpustakaan Widyapustaka Pura Pakualaman dijumpai 29 naskah bertarikh sekitar 1878 – 1900 atau yang ditulis pada masa Paku Alam V bertahta. Naskah-naskah itu meliputi naskah yang bergenre sastra (17), babab (7), piwulang (4), dan Islam (1). Tidak semua naskah menyebut nama juru tulis, namun berdasarkan pengamatan terhadap corak tulisannya diperkirakan ada tujuh juru tulis yang empat di antaranya adalah Jayengkusumo, Jayenguturo, Notosaputro, dan Trunosetro. Adapun tiga juru tulis lainnya belum diketahui namanya dan memerlukan penelitian tersendiri. Dari keempat juru tulis yang telah diketahui namanya itu, hanya Trunosetro yang dalam menyajikan tulisannya masih harus dikoreksi oleh Suryamisena. Dilihat dari hubungan kekerabatan dengan Paku Alam V melalui buku “Silsilah Keluarga Paku Alam” diketahui bahwa Jayengkusumo, Jayenguturo, Notosaputro, dan Suryom adalah sentono Pakualaman (Cakrakusuma dan Himadigdaya, t.t.: 68 dan 99 dalam S.R. Saktimulya 2014 : 97).

Paku Alam V sebagai penguasa tertinggi di Kadipaten Pakualaman selain bertanggung jawab terhadap kemajuan pemerintahannya juga terhadap seni, sastra, dan budaya. Keberhasilan itu tidak dapat dipisahkan dari dukungan sentana dan para abdi yang setia sebagai kepanjangan tangan bagi terwujudnya harapan-harapan Paku Alam V. Oleh sebab itu di sela kesibukannya membenahi masalah perekonomian Pakualaman, ia

memprakasai penyalinan dan penyaduran sejumlah naskah untuk tujuan tertentu. Berbagai pesan dan harapan pemrakarsa – dalam hal ini Paku Alam V – dapat diketahui melalui bait-bait awal dan akhir naskah yang bersangkutan. Selain itu, khusus pada skriptorium Pakualaman, pesan pemrakarsa pun “dapat dibaca” melalui goresan *rĕrĕnggan* atau gambar penghias naskah dengan tujuan memudahkan pembaca dalam mencerna pokok pikiran di sela teksnya (S.R. Saktimulya, 2014: 98)

Di bidang karya sastra, Paku Alam V memprakarsai penyalinan dan penyaduran sejumlah naskah. Beberapa naskah yang kemudian disalin dan disadur antara lain adalah *Baratayuda*, *Piwulang Putra-putri*, dan *Pakem Tarugana*. Di dalam ketiga naskah tersebut ditunjukkan bagaimana Paku Alam V mensinergikan antar tradisi dan modernitas. Secara tegas naskah-naskah tersebut menjelaskan tentang pendidikan Barat bagi kerabat Pakualaman tanpa perlu meninggalkan kultur Jawa yang selama ini dikembangkan di dalam lingkup istana (Mutiah Amini dalam Sudibyoy 2018: 88).

Pengiriman kerabat Pakualaman untuk menempuh pendidikan Barat banyak dilakukan pada tahun 1890an. Diduga hal ini tidak bisa dilepaskan dari rasionalisasi jabatan yang kemudian ada di dalam kehidupan istana. Jika dalam periode sebelumnya kerabat Pakualaman tanpa kemampuan pendidikan Barat yang baik dapat dengan mudah diterima masuk di dalam Legiun Pakualaman pada 3 Agustus 1892 legiun ini dibubarkan oleh

pemerintah kolonial. Akibat yang kemudian terasa adalah bahwa kerabat Pakualaman kemudian mendapatkan kesempatan yang lebih kecil untuk bekerja di lingkungan istana. Mereka harus dapat merespon berbagai pekerjaan yang kemudian tersedia di luar lingkup istana. Di satu sisi, pembubaran Legiun Pakualaman menjadi hal yang menyulitkan bagi kerabat Pakualaman, tetapi di sisi lain pembubaran ini justru menjadi pendorong penting bagi perluasan pendidikan Barat bagi kerabat Pakualaman secara luas (Mutiah Amini dalam Sudibyo 2018: 86).

## KESIMPULAN

Kadipaten Pakualaman merupakan sebuah negara dependen atau otonom berbentuk monarki yang terkecil dari monarki yang ada di Jawa. Monarki Kadipaten Pakualaman dibentuk dengan sistem monarki Kepangeranan atau lazim disebut *Pangeran Merdika*. Pemerintahan Kadipaten Pakualaman dijalankan oleh Sri Paku Alam. Pada masa pemerintahan Paku Alam V, pemerintahan yang dilaksanakan olehnya masih berjalan dibawah aturan-aturan yang berlaku dan dikeluarkan oleh gubernemen Belanda. Pada tahun 1892 Sri Paku Alam V dibebaskan dari kewajiban untuk memelihara sebuah Legiun untuk kepentingan gubernemen Belanda. Meskipun dibebaskan dari kewajiban tersebut, Pakualman V masih tetap mempunyai hak untuk mempergunakan pangkat militernya secara kehormatan. Yang dilakukan oleh Paku Alam V setelah keputusan pembubaran Legiun adalah

meningkatkan kinerja polisi dan pengadilan.

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Paku Alam V pada masa pemerintahannya pada bidang politik adalah melakukan pembagian kekuasaan secara terstruktur dengan penegakan hukum yang baik, adanya pendelegasian wewenang serta pembagian kekuasaan pada orang-orang yang sangat dipercayai olehnya. Pada bidang Ekonomi, Paku Alam V melakukan reformasi pengelolaan keuangan yang baik dan tugas tersebut diserahkan kepada anaknya K.P.H. Notodirojo untuk memperbaiki neraca keuangan yang tidak seimbang. Selain berhasil dalam pengelolaan keuangan, Paku Alam V kembali menugaskan anaknya mengurus tanah keagrariaan dengan sewa, pajak dan bagi hasil atas tanah yang dikelola warga, langsung berhubungan dengan pihak istana tanpa perantara. Pada bidang sosial, Paku Alam V mengatasi konflik warga lokal dengan warga Eropa menggunakan norma adat serta pada bidang pendidikan mendirikan *Darmawara* sebuah perkumpulan untuk membantu warga tidak mampu untuk bersekolah di sekolah Belanda. Kemudian pada bidang budaya, Paku Alam V memprakarsai penyalinan dan penyaduran sejumlah naskah untuk tujuan tertentu serta naskah tersebut dibuat dengan sederhana yang menggambarkan pribadi Sang Adipati dalam menjalankan pemerintahannya dan kehidupannya sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amini, Mutiah. 2018. "Melawat ke Barat: Westernisasi Pendidikan Keluarga Paku Alam V". Dalam Sudibyo (Ed.), *Aristo-Modernis dari Timur: Paku Alam V, Westernisasi, dan Paradoks Kebudayaan*, Yogyakarta: Perpustakaan Pura Pakualaman Hudyono.
- Dwiyanto, Djoko. 2009. *Puro Pakualaman: Sejarah, Kontribusi, dan Nilai Perjuangannya*. Yogyakarta: Paradigma Indonesia.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah Edisi Kedua*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Laely, Nur. 2018. *Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda Di Onderafdeling Bonthain 1905-1942*. Tesis tidak diterbitkan. Makassar: Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.
- Moedjanto, G. 1994. *Kasultanan Yogyakarta & Kadipaten Pakualaman*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nazir, Moh. 1988. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurhamidyah, I., Nabillah, Y.P., Mulya, L. 2019. "Praktik Deskripsi dan Klasifikasi Khazanah Arsip Paku Alam V (1878–1900) di Puro Pakualaman Yogyakarta." *Jurnal Diplomatika*, 3 (1), 110-125. DOI:<https://doi.org/10.22146/diplomatika.60885>.
- Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 2017. *Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Biro Tata Pemerintah Setda DIY.
- Poerwokoesoemo, Soedarisman. 1985. *Kadipaten Pakualaman*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. 2016. *Sistem Pemerintahan Negara: Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Saktimulya, S. R. 2018. "Penyalinan dan Penyaduran Naskah Pakualaman pada Masa Paku Alam V (1878 – 1900)". Dalam Sudibyo (Ed.), *Aristo-Modernis dari Timur: Paku Alam V, Westernisasi, dan Paradoks Kebudayaan* (hlm. 73-91). Yogyakarta: Perpustakaan Pura Pakualaman Hudyono.
- Saktimulya, S.R. 2014. "Penyalinan Dan Penyaduran Naskah Pakualaman Pada Masa Paku Alam V (1878—1900)". *Jurnal Atavisme*, 17 (1) : 95-106. DOI:<https://doi.org/10.24257/atavisme.v17i1.22.95-106>.  
<http://www.kerajaannusantara.com/id/kadipaten-pakualaman/pemerintahan> Diakses pada 8 Agustus 2021.
- Sudibyo, dkk. 2018. *Aristo-Modernis dari Timur: Paku Alam V, Westernisasi, dan Paradoks Kebudayaan*. Yogyakarta: Perpustakaan Pura Pakualaman Hudyono-Yogyakarta bekerjasama dengan Interlude.
- Sudibyo. 2015. "Paku Alam V: Sang Aristo-Modernis Dari Timur". *Jurnal Paramita*, 25 (1) : 118-134. DOI:<https://doi.org/10.15294/paramita.v25i1.3425>.
- Sudibyo. 2018. "Paku Alam V: Sang Aristo-Modernis Dari Timur". Dalam Sudibyo (Ed.), *Aristo-Modernis dari Timur: Paku Alam V, Westernisasi, dan Paradoks Kebudayaan* (hlm. 1-26).

- Yogyakarta: Perpustakaan Pura Pakualaman Hudyono.
- Surakhmad, Winarno. 1982. *Pengantar Interaksi Belajar Mengajar, Dasar dan Teknik Metodologi Pengajaran*. Bandung: Tarsito.
- Uddin, Baha. 2014. “*Westernisasi Dan Gaya Hidup Bangsawan Di Kadipaten Pakualaman Pada Masa Paku Alam V*”. *Jurnal Patrawidya*, 15 (3) : 1 – 27.
- \_\_\_\_\_, Baha. 2018. “Westernisasi dan Gaya Hidup Bangsawan di Kadipaten Pakualaman pada Masa Paku Alam V”. Dalam Sudibyo (Ed.), *Aristo-Modernis dari Timur: Paku Alam V, Westernisasi, dan Paradoks Kebudayaan* (hlm. 51-72). Yogyakarta: Perpustakaan Pura Pakualaman Hudyono.